

Analisis Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Steven Joshua; steven.joshua@kemenkeu.go.id^{1*}
Alfian bagas Ferdiansyah; alfian.ferdiansyah@kemenkeu.go.id²
Sulistiana; sulistiana.05@kemenkeu.go.id³
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sektor – sektor yang menjadi sektor basis pada Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis pengaruh Sektor Basis tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2018 – 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan metode analisis Location Quotient (LQ). Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan 11 (sebelas) sektor basis yang ada di Provinsi DKI Jakarta meliputi Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan, dan Sektor Jasa Lainnya. Pembahasan dilakukan dengan pengujian klasik dan pengujian hipotesis akan diketahui bagaimana pengaruh Sektor Basis terhadap PAD Provinsi Jakarta.

Kata kunci: Sektor Basis; Pendapatan Asli Daerah; Analisis LQ

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the sectors that are basis sectors in DKI Jakarta Province and to analyze the influence of these Base Sectors on Local Revenue of DKI Jakarta during the period 2018 – 2022. This research uses secondary data from Statistics Indonesia and Ministry of Finance of Republic of Indonesia. The data obtained is then processed using the Location Quotient analysis methods. Based on the analysis conducted, 11 basic sectors were found in DKI Jakarta including the Construction Sector, Wholesale and Retail Trade Sector, Accommodation and Food and Drink Provision Sector, Information and Communication Sector, Financial Services and Insurance Sector, Real Estate Sector, Corporate Services Sector, Government Administration, Defense, and Social Security Sector, Education Service Sector, Health Services Sector, and Other Service Sector. This study using classic testing and hypothesis testing to know how the base sector influence the Local Revenue of DKI Jakarta Province.

Keywords: Base Sector; Local Revenue; LQ Analysis

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia hingga saat ini dan merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk DKI Jakarta berada pada urutan pertama di Indonesia yaitu sekitar 10,56 juta jiwa dan luas wilayah sebesar 7.641,51 km² (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pusat perekonomian di Indonesia (Arief, 2009). Sebagai pusat perekonomian dengan sumbangsih Produk Domestik Regional Bruto terbesar dibandingkan Provinsi lainnya dengan persentase diatas 17% (Badan Pusat Statistik, 2021), DKI Jakarta didukung oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, dan lain-lain (Kementerian

Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Masing-masing sektor ekonomi yang ada tentunya memiliki dampak ekonomi serta kontribusi yang berbeda-beda terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penanaman modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta sumber pendapatan daerah lain yang sah (Yuniara & Mais, 2020). Menurut Muta'Ali dalam Ferdiansyah dan Panjaitan (2022) dengan bertambahnya jumlah sektor basis di suatu daerah maka akan mendorong peningkatan pendapatan daerah tersebut. Berdasarkan data pada BPS DKI Jakarta dan portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PAD paling tinggi di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tren besaran PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 berturut-turut sebesar Rp43.327,14 M, Rp45.707,40 M, Rp57.561,16 M, Rp41.606,31 M, Rp45.635,08 M. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa PAD Provinsi DKI Jakarta relatif mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Menurut Vikaliana (2007), sasaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat seiring kebutuhan pembangunan yang juga meningkat. Dalam hal ini, tidak semua sektor ekonomi suatu daerah memiliki kemampuan pertumbuhan yang sama. Sehingga, suatu daerah akan cenderung memanfaatkan sektor – sektor basis yang dianggap lebih memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini disebabkan karena saat sektor basis suatu daerah melakukan ekspor barang/jasa ke luar daerah tersebut, akan terjadi arus pendapatan dari luar daerah yang meningkatkan konsumsi dan investasi secara signifikan sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya secara keseluruhan (Ufitri & Puspitasari, 2022). Sehubungan hal tersebut, diperlukan identifikasi sektor – sektor basis yang dimiliki oleh suatu daerah agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka meningkatkan PAD daerah tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis ingin menganalisis lebih dalam apakah dengan sektor jasa perusahaan sebagai sektor basis dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta dapat berkontribusi terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta yang cukup tinggi atau tidak. Selain itu, informasi yang akan diperoleh dapat membantu mengidentifikasi potensi sektor basis dan sektor perekonomian lain yang masih dapat dioptimalkan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau negara tertentu. Pertumbuhan perekonomian di suatu daerah umumnya dilihat dan ditentukan melalui perubahan *output* yang dihasilkan dari daerah tersebut. Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan *output* yang dimaksud disini adalah peningkatan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan di dalam suatu daerah tertentu.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari dukungan sektor – sektor lapangan usaha yang akan terus beroperasi dan berkembang untuk menggerakkan roda perekonomian. Di Indonesia, setidaknya terdapat 17 sektor lapangan usaha yang menopang laju pertumbuhan ekonomi hingga saat ini (Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2022). Daerah – daerah di Indonesia memiliki sektor unggulannya masing – masing tergantung dari potensi ekonomi apa yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan di daerah tersebut. Sektor unggulan di suatu daerah diharapkan mampu memberikan dukungan dalam peningkatan *output* ekonomi dan menjadi penopang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, ketika sektor unggulan mampu memberikan manfaat untuk daerah lain dalam hal perekonomian daerah, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa produksi barang dan/atau jasa di sebuah tersebut telah memadai (Ferdiansyah, 2022).

Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dan ditunjukkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah (Romhadhoni, Faizah, & Afifah, 2018). PDRB menjadi indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya informasi mengenai nilai tambah produk barang/jasa yang dihasilkan dalam wilayah tertentu. Teridentifikasinya nilai tambah tersebut mampu memperlihatkan keadaan perekonomian suatu daerah sedang berkembang dengan baik atau malah sedang terpuruk.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sebuah data statistik uang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi serta mengevaluasi kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu. Arifin dalam Megasari (2020) mengungkapkan bahwa PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di satu wilayah, dan juga menjadi salah satu indikator yang menunjukkan jumlah nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas/sektor perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel 1. Persentase Sektor Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Provinsi DKI Jakarta

No.	Sektor Lapangan Usaha (Seri 2010)	Persentase Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,17%	0,15%	0,15%	0,14%	0,12%
3.	Industri Pengolahan	12,66%	11,82%	10,85%	11,64%	11,72%
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30%	0,32%	0,29%	0,24%	0,22%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
6.	Konstruksi	12,44%	11,97%	11,58%	11,19%	10,81%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,90%	15,86%	15,11%	15,38%	15,75%
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,53%	3,62%	3,43%	3,73%	3,80%
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,92%	4,97%	4,27%	4,49%	4,67%
10.	Informasi dan Komunikasi	10,89%	11,49%	13,07%	13,21%	13,42%
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,59%	10,84%	11,59%	11,21%	10,78%
12.	Real Estate	6,42%	6,35%	6,61%	6,49%	6,29%
13.	Jasa Perusahaan	8,04%	8,45%	8,47%	8,17%	8,21%
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91%	3,83%	3,70%	3,47%	3,36%
15.	Jasa Pendidikan	4,64%	4,62%	4,86%	4,73%	4,49%
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65%	1,67%	2,05%	2,14%	2,22%
17.	Jasa lainnya	3,81%	3,92%	3,86%	3,65%	4,00%
Total		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah oleh penulis

PDRB sebagai fungsinya untuk menjadi indikator dalam mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan perubahan nilai barang/jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, biasanya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi harga. Sedangkan, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan perubahan nilai barang/jasa menggunakan harga pada tahun berjalan, biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Nilai PDRB setiap tahunnya akan selalu mengalami kenaikan atau penurunan pada setiap sektor usahanya, begitu juga dengan nilai PDRB di Provinsi DKI Jakarta yang senantiasa berubah-ubah setiap tahunnya. Nilai persentase dari hasil akhir sektor-sektor lapangan usaha terhadap total nilai PDRB di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Sektor Basis dan Sektor Nonbasis

Sektor basis atau biasa disebut dengan sektor unggulan akan selalu erat hubungannya dengan persaingan dan perbandingan, baik dalam skala internasional, nasional, maupun regional (Antara, 2007). Suatu sektor akan dikatakan sebagai sektor basis atau unggulan apabila hasil sektor dari suatu wilayah atau daerah mampu bersaing dengan wilayah yang lain pada sektor yang sama. Selain itu sektor basis biasanya melayani penjualan barang dan/atau jasa baik di daerahnya sendiri maupun di daerah-daerah lainnya, bahkan bisa hingga melakukan ekspor ke luar negeri. Menurut Sjafrizal (2008) Sektor basis merupakan sektor yang memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian suatu daerah karena memiliki keuntungan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor usaha yang lain dalam daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor basis dalam sebuah daerah memiliki manfaat yang cukup penting sebagai bagian dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut.

Selain sektor basis atau unggulan, dalam suatu daerah pasti terdapat juga sektor-sektor nonbasis yang kurang diunggulkan. Sektor nonbasis merupakan sektor lapangan usaha suatu daerah yang hanya bisa melayani pasar di daerahnya tersebut (Arsyad, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa sektor nonbasis adalah sektor usaha dimana hasil produksi mereka tidak dapat melebihi dari hasil produksi sektor basis karena fokus pelayanan mereka yang hanya sebatas kebutuhan daerahnya saja berbeda dengan sektor basis yang sudah melayani pasar di luar daerahnya. Dalam hal untuk menentukan sektor basis dan nonbasis di suatu daerah dapat menggunakan dengan sebuah metode yang dinamakan *Location Quotient* (LQ). Metode LQ merupakan metode pengukuran yang membandingkan porsi jumlah produksi atau nilai tambah sektor tertentu di suatu daerah dengan porsi jumlah produksi atau nilai tambah pada sektor yang sama secara nasional (Pratama, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu penerimaan daerah yang menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian sebuah daerah tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan PAD menunjukkan keberhasilannya dalam melaksanakan otonomi daerah serta telah mewujudkan asas desentralisasi. Menurut Aggraeni (2010), PAD merupakan penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari kekayaan daerah itu sendiri, dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan tren realisasi pendapatan asli daerah akan mendorong suatu daerah

menjadi daerah yang mandiri dengan menurunkan tingkat ketergantungan atas pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan dengan membuktikan hubungan antar variabel yang diperoleh menggunakan prosedur - prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari (1) data yang berasal dari BPS diantaranya data PDB atas harga konstan 2010 Negara Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2018 – 2022 (2) data yang berasal dari BPS Provinsi DKI Jakarta diantaranya data PDRB atas harga konstan 2010 Provinsi DKI Jakarta lapangan usaha dari 2018 – 2022 (3) data yang bersumber dari portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu data realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022. Variabel pada penelitian ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh PDRB Sektor Basis Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 sebagai variabel independen dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 sebagai variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data serta informasi dari berbagai sumber pustaka, misalnya dokumen, buku, majalah, dan sumber lainnya (Siallagan & Hasudungan, 2019). Dalam praktiknya, studi kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu dengan membaca, memahami, menelaah, dan mempelajari berbagai informasi yang berkaitan dengan topik ini. Informasi-informasi tersebut bersumber dari penelitian sebelumnya, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan pemerintah daerah, dan sumber informasi lainnya yang dapat menguatkan landasan teori dan menjadi sumber acuan untuk penulis.

Teknik Analisis Data

Dalam rangka mengetahui sektor basis yang ada di suatu daerah, maka diperlukan suatu metode analisis. Dalam hal ini, metode analisis yang akan digunakan berupa analisis Location Quotient (LQ). Menurut (Basuki & Mujiraharjo, 2017), metode analisis LQ merupakan salah satu metode untuk dapat membuktikan sebuah daerah memiliki karakteristik net importer atau net exporter dalam suatu produk atau suatu sektor tertentu. Sehingga, dengan analisis LQ ini dapat dibuktikan sektor basis apa yang dimiliki pada Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis LQ ini juga sudah umum digunakan dalam berbagai penelitian seperti Wicaksono, I. A. dalam Analisis Location Quotient sektor dan Subsektor Pertanian Pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo, Muljanto, M. A. dalam Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo serta berbagai penelitian lainnya.

Dengan menggunakan metode analisis LQ didapat sektor basis dengan nilai paling tinggi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022 adalah sektor jasa perusahaan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang dimuat dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Jasa Perusahaan sebagai sektor basis di Provinsi DKI Jakarta tentunya relevan dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia yang kegiatan ekonominya tidak hanya didorong oleh produksi namun juga sektor jasa. Untuk melihat pengaruh sektor basis (PDRB Jasa Perusahaan) terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022, maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Terdapat dua metode pengujian yang dilakukan yaitu pengujian klasik yang bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan memenuhi persyaratan regresi sederhana dan pengujian hipotesis untuk membuat keputusan apakah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Sektor Basis dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan ekonomi di daerah didukung dari beberapa sektor perekonomian di daerah (Nurbianto & Panjaitan, 2022). Sektor perekonomian tersebut terdiri dari 17 sektor lapangan usaha. Dari keseluruhan sektor lapangan usaha tersebut, terdapat sektor basis/unggulan di daerah. Sektor basis menjadi sebuah lapangan usaha yang mampu mencukupi kebutuhan daerah lokal maupun permintaan daerah lain. Dengan begitu, secara tidak langsung sektor basis ini mendukung pendapatan daerah selama sektor tersebut dibutuhkan oleh daerah lain. Namun, dibalik dukungan tersebut, sektor basis bersifat tidak stabil dikarenakan kebijakan pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan sektor mana yang dapat mendukung perekonomian. Selain itu, ketidakstabilan ini juga dikarenakan oleh situasi pasar yang terkadang tidak menentu dan dipengaruhi oleh pasar internasional sehingga berdampak pada perekonomian di daerah (Ferdiansyah & Panjaitan, 2022). Namun, tidak semua sektor basis di daerah mendukung dan berkontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan sektor basis masing-masing daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda setiap daerah.

Salah satu daerah yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat perekonomian Indonesia, maka sebagian besar sektor ekonomi potensial beroperasi di Provinsi DKI Jakarta sehingga membuat perekonomian DKI Jakarta lebih tinggi dari daerah lain (Nur & Rakhman, 2019). Perekonomian yang tinggi tersebut juga dikarenakan Provinsi DKI Jakarta adalah Ibukota Negara Indonesia sehingga menjadi pusat pemerintahan. Perekonomian yang tinggi tersebut juga disebabkan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di postur APBD Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta memiliki porsi 70% dari total pendapatan daerahnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat tinggi tersebut, penulis ingin mengetahui apakah sektor basis/unggulan di Provinsi DKI Jakarta berpengaruh/memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahui sektor basis di sebuah daerah maka penulis menggunakan Analisis Location Quotient (LQ). Sektor basis di Provinsi DKI Jakarta terdapat 11 sektor lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan. Selain itu, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta, penulis menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana.

Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Sektor lapangan usaha di Indonesia terdiri dari 17 sektor. Di setiap sektornya pasti memiliki potensi masing-masing. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerahnya dari sisi pendapatannya. Pendapatan di daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pendapatan Lainnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Dengan menggunakan perhitungan analisis Location Quotient (LQ), sektor lapangan usaha yang terdiri dari 17 jenis dapat diketahui sektor yang menjadi sektor basis dan nonbasis di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel LQ Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 yang terdapat pada Tabel 2, dari 17 sektor lapangan usaha, Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa sektor unggulan/basis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk bisa menjadi sektor basis di sebuah daerah, maka nilai perhitungan *Location Quotient* (LQ) harus lebih dari 1 ($LQ > 1$). Sektor basis/unggulan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022 yaitu ada 11 sektor yang meliputi Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan, dan Sektor Jasa Lainnya.

Tabel 2. LQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No.	Sektor Lapangan Usaha (Seri 2010)	LQ Provinsi DKI Jakarta					Rata - rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,021	0,020	0,019	0,018	0,016	0,019
3.	Industri Pengolahan Ulang	0,577	0,545	0,507	0,544	0,548	0,544
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,281	0,300	0,276	0,218	0,199	0,255
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,504	0,485	0,453	0,448	0,435	0,465
6.	Konstruksi	1,187	1,133	1,116	1,083	1,076	1,119
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,155	1,156	1,126	1,132	1,153	1,145
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,812	0,821	0,900	0,980	0,874	0,877
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,562	1,566	1,475	1,543	1,502	1,529
10.	Informasi dan Komunikasi	2,021	2,046	2,071	2,023	2,003	2,033
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,548	2,568	2,617	2,573	2,549	2,571
12.	Real Estate	2,142	2,103	2,105	2,078	2,079	2,102
13.	Jasa Perusahaan	4,284	4,285	4,475	4,420	4,289	4,351
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,121	1,100	1,045	1,016	1,008	1,058
15.	Jasa Pendidikan	1,445	1,422	1,434	1,440	1,426	1,434
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,409	1,374	1,488	1,452	1,540	1,452
17.	Jasa lainnya	2,056	2,009	2,026	1,941	2,038	2,014

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah oleh penulis

Sektor-sektor tersebut selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi DKI Jakarta, juga mampu diimpor ke daerah lain sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan untuk Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2018 – 2022. Selain itu, sektor yang paling unggul di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 adalah Sektor Jasa Perusahaan. Sektor Jasa Perusahaan menjadi sektor paling unggul di Provinsi DKI Jakarta karena memiliki nilai rata-rata LQ paling besar yaitu 4,351. Maka dari itu, Sektor Jasa Perusahaan diharapkan mampu memberikan *value added* untuk perekonomian daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Sektor Basis (Jasa Perusahaan) Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan perhitungan analisis LQ, sektor jasa perusahaan adalah sektor basis yang memiliki nilai rata-rata LQ dari tahun 2018 – 2022 tertinggi yaitu 4,351. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh sektor basis terhadap peningkatan PAD Provinsi DKI Jakarta, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan model regresi sederhana. Tujuan utama dari

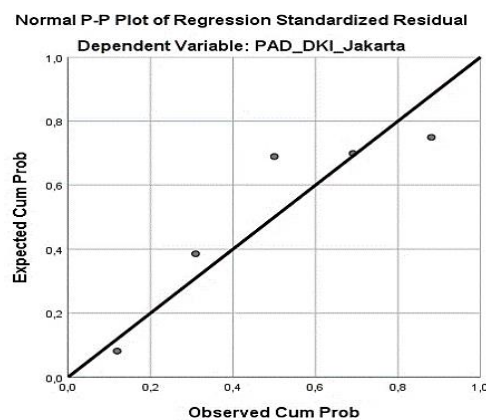
model regresi sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (PDRB Jasa Perusahaan) terhadap variabel tak bebas (PAD Provinsi Jakarta).

a. Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Model regresi linear dikatakan layak digunakan apabila sebaran titik-titik pada plot berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Tujuan utama dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah nilai terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada nilai residualnya karena model regresi yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal adalah model regresi terbaik. Terdapat dua metode untuk menguji uji normalitas yaitu metode grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Khusus pada penelitian ini menggunakan metode grafik dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik P-P Plot of Regression Standardized Residual. Gambar 1 memperlihatkan bahwa data terdistribusi normal yang ditandai oleh sebaran titik-titik mengikuti garis diagonal.

Gambar1. Grafik P-Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: diolah oleh penulis menggunakan SPSS

2) Uji Heteroskedesitas

Selain memiliki data yang terdistribusi normal, model regresi yang baik adalah adanya kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (homoskedastisitas). Untuk mengetahui adanya kesamaan varians dari residual tersebut maka diperlukan uji heteroskedesitas. Untuk mendeteksi heteroskedesitas digunakan dua metode meliputi metode grafik dan uji Glejser. Dalam penelitian ini digunakan uji Glejser dengan meregresikan absolut residual (sebagai Y) dengan variabel bebas (sebagai X).

Tabel 3. Annova A

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	13837,408	1	13837,408	,004	,954 ^b
Residual	10592106,803	3	3530702,268		
Total	10605944,211	4			

a. Dependent Variable: abs_res

b. Predictors: (Constant), PDRB_Jasa_Perusahaan

Sumber : diolah oleh penulis menggunakan SPSS

Hasil uji Glejser menyatakan bahwa nilai dari signifikansi variabel bebas sebesar 0,954 lebih besar daripada nilai *p-value* sebesar 0,05. Artinya, tidak ada gejala heteroskedastisitas pada data atau data dikatakan homoskedastisitas.

b. Pengujian Hipotesis

1) Uji F-Statistik (Simultan)

Uji F-statistik atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (PDRB Jasa Perusahaan) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel tidak bebas (PAD DKI Jakarta). Dengan bantuan tabel Annova maka diketahui nilai signifikansi F

dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi F lebih besar daripada 0,05 maka hasilnya gagal tolak hipotesis nol (H_0), artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tidak bebas. Kebalikannya, jika nilai signifikansi F lebih kecil daripada 0,05 maka hasilnya tolak H_0 , artinya variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tidak bebas. Berikut merupakan perumusan hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : $\beta_1 = 0$ (PDRB Jasa Perusahaan secara parsial tidak mempengaruhi PAD DKI Jakarta)

H_1 : $\beta_1 \neq 0$ (PDRB Jasa Perusahaan secara parsial mempengaruhi PAD DKI Jakarta)

Tabel 4. Annova B

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3149527,237	1	3149527,237	,215	,675 ^b
Residual	44025680,315	3	14675226,772		
Total	47175207,552	4			

a. Dependent Variable: PAD_DKI_Jakarta

b. Predictors: (Constant), PDRB Jasa Perusahaan

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,675 lebih besar daripada 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 . Jika menggunakan nilai F hitung sebesar 0,215 yang nilainya lebih kecil daripada F tabel sebesar 10,13 sehingga keputusan yang diambil juga sama yaitu gagal tolak H_0 . Dari keduanya dapat diartikan bahwa PDRB jasa perusahaan secara simultan tidak mempengaruhi PAD DKI Jakarta pada periode tahun 2018 – 2022.

2) Uji t-Statistik (Parsial)

Uji t-statistik atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (PDRB Jasa Perusahaan) secara masing-masing (parsial) mempengaruhi variabel tidak bebas (PAD DKI Jakarta). Apabila uji F dilakukan secara simultan maka uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t pada masing-masing variabel bebas. Nilai dari signifikansi t di dapat dari tabel koefisien yang merupakan *output* olahan data SPSS. Berikut merupakan perumusan hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : $\beta_1 = 0$ (PDRB Jasa Perusahaan secara parsial tidak mempengaruhi PAD DKI Jakarta)

H_1 : $\beta_1 \neq 0$ (PDRB Jasa Perusahaan secara parsial mempengaruhi PAD DKI Jakarta)

Tabel 5. Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coef.	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
¹ (Constant)	25244,710	37799,941		,668	,552
PDRB_Jasa_Perusahaan	,115	,249	,258	,463	,675

a. Dependent Variable: PAD DKI Jakarta

Sumber : diolah oleh penulis menggunakan SPSS

Hasil dari tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi t untuk PDRB jasa perusahaan adalah 0,675 yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 . Artinya, PDRB jasa perusahaan yang mewakili sektor basis secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2018 – 2022. Selain diketahui nilai signifikansi, tabel koefisien juga menampilkan nilai konstan dan koefisien yang berturut-turut 25.244,710 dan 0,115 sehingga di dapat persamaan regresi sederhana ($\text{PAD DKI Jakarta} = 25.244,710 + 0,115 \text{ PDRB Jasa Perusahaan}$).

c. Pembahasan

Menurut hasil *output* olahan menggunakan aplikasi SPSS, data yang digunakan layak memenuhi persyaratan model regresi sederhana yaitu data terdistribusi dengan normal dan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada data atau adanya kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Sementara itu, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F-statistik (simultan) dan Uji t-statistik (parsial). Hasil dari keduanya, baik secara simultan maupun parsial PDRB jasa perusahaan yang mewakili nilai dari sektor basis tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2018 – 2022.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan penelitian Andivana (2019), sektor basis tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD Provinsi Maluku Utara karena tidak ada sektor basis yang secara langsung berkaitan dengan PAD, salah satunya sektor akomodasi dan makan minum. Sama seperti Provinsi DKI Jakarta dan Maluku Utara, Provinsi Lampung menurut penelitian Maulana (2020), sektor basis juga tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal tersebut karena sektor pertanian yang merupakan sektor basis di Provinsi Lampung mengalami pergeseran tren yang mana pertanian tidak lagi menjadi penyuplai terbesar dalam PAD Provinsi Lampung.

Alasan sektor basis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta karena sektor jasa perusahaan bukanlah komponen penyuplai terbesar untuk PAD DKI Jakarta. Berdasarkan postur APBD Provinsi DKI Jakarta, pajak daerah merupakan komponen penyumbang PAD terbesar di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018 – 2022. Apabila di telaah lebih lanjut dalam LKPD Provinsi DKI Jakarta, rekapitulasi realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 – 2022 seperti yang tertera pada Tabel 4 sangat bervariasi. Pada tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang sebanyak 8,63 triliun rupiah yang menjadi sumber terbesar dari pajak daerah. Mundur ke tahun 2020 yang menjadi penyumbang hasil pajak daerah terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 8,96 triliun rupiah. Sementara tahun 2019 dan 2018 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber terbesar penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing sebesar 9,65 triliun rupiah dan 8,89 triliun rupiah. Meskipun demikian, realisasi penerimaan PKB cenderung konsisten meningkat dari tahun 2018 – 2021 dan sedikit menurun di tahun 2021. Menurut Prawita (2018), pajak kendaraan bermotor merupakan sumber PAD yang sangat potensial. Menurut beliau juga faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya pajak kendaraan bermotor meliputi jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dengan asumsi jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah kendaraan di daerah bersangkutan, nilai PDRB sektor transportasi, dan PDRB per kapita. Dari survei BPS, ada peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta setiap tahunnya.

Hal lain juga didukung dari kuadran hasil tipologi *Klassen* sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 sektor jasa perusahaan masuk ke kuadran II yaitu sektor berkembang (maju tapi tertekan). Selain itu, terdapat tantangan fiskal pada sektor basis DKI Jakarta yang tertera pada dokumen Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu bagaimana insentif fiskal bagi perusahaan *real estate* seperti pembebasan PPh, penurunan tarif PPh Badan dan PPN dapat semakin efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) maka dapat diketahui sektor unggulan/basis di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 yaitu ada 11 sektor yang meliputi Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan, dan Sektor Jasa Lainnya. Selain itu, sektor yang paling unggul di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 adalah Sektor Jasa Perusahaan Untuk melihat pengaruh sektor basis (PDRB Jasa Perusahaan) terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022, terdapat dua metode pengujian yang dilakukan yaitu pengujian klasik yang bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan memenuhi persyaratan regresi sederhana dan pengujian hipotesis untuk melihat apakah sektor basis berpengaruh terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Setelah dilakukannya pengujian dapat diketahui bahwa sektor basis tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022. Alasan lainnya adalah karena dilihat dari postur APBD Provinsi DKI Jakarta, pajak daerah merupakan komponen penyumbang PAD terbesar di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2022. Kesimpulan (*conclusion*) pada dasarnya bukan merupakan ringkasan (*summary*) tetapi merupakan jawaban atas permasalahan penelitian. Bagian ini disajikan dalam bentuk paragraf, bukan *numbering/listing*.

Atas kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelatihan SDM seperti (a) pelatihan keamanan dan keselamatan jalan raya bagi agen perjalanan/*tour*, (b) pembekalan materi dan teknis kepada sektor Jasa Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil dan sektor Jasa Perusahaan lainnya yang memerlukan keahlian khusus dalam menjalankan usahanya, 2) membantu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana seperti angkutan umum bagi agen perjalanan ataupun sarana dan prasarana lainnya bagi pelaku usaha lain yang bergerak dalam sektor jasa perusahaan, 3) mendorong kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Perusahaan melalui kemudahan dalam perizinan usaha, 4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu membuat prioritas pengalokasian anggaran untuk sektor basis melalui pemberian insentif berupa subsidi bunga khususnya kepada UMKM yang bergerak pada sektor jasa perusahaan dalam pembiayaan modal melalui bank milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Selain itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah (1) melakukan wawancara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya bagian BPKAD untuk memastikan keakuratan data dan untuk memvalidasi hasil penelitian ini, (2) menambah variabel independen yang digunakan dalam penelitian, (3) melakukan penelitian pada daerah lain yang memiliki sektor basis yang sama untuk mengetahui apakah sektor basis tersebut berpengaruh terhadap PAD atau tidak.

REFERENSI

- Antara, M. (2020). Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Bali. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(2), 1-30.
- Arief, G. I. (2009). Identifikasi dan Peran Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta. *IPB Thesis*, 1-34.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2022, Februari 21). Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi. Jakarta, Indonesia.
- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 52-60.

- DJPK Kemenkeu. (2019). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi=09&pemda=00>
- DJPK Kemenkeu. (2020). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi=09&pemda=00>
- DJPK Kemenkeu. (2021). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=09&pemda=00>
- DJPK Kemenkeu. (2022). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=09&pemda=00>
- DJPK Kemenkeu. (2023). *Postur APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=09&pemda=00>
- Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). *Kajian Fiskal Regional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022*. Jakarta: Kanwil DJPb DKI Jakarta.
- Pratama, M. P. (2020). Analisis dan Kontribusi Sektor Basis Non-Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 75-82.
- Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 115-121.
- Siallagan, & Hasudungan, A. R. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Blended Learning Sebagai Inovasi Model Pembelajaran di Era 21. *Universitas Negeri Medan*, 50-58.
- Ufitri, A. N., & Puspitasari, A. Y. (2022). Analisis Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Arahana Pembangunan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 134-153.
- Vikaliana, R. (2017). Analisis Identifikasi Sektor Perekonomian Sebagai Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 198-208.
- Yuniara, W., & Mais, R. G. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-16.